



# Orasi Ilmiah Guru Besar IPB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

## Pengarusutamaan Gender dan Pembangunan: Peran Komunikasi

Prof. Dr. Ir. Aida Vitayala S. Hubeis

Guru Besar Tetap Fakultas Ekologi Manusia  
Institut Pertanian Bogor

Bogor Agricultural University

Auditorium Rektorat, Gedung Andi Hakim Nasoetion, 25 September 2010



**ORASI ILMIAH GURU BESAR  
DALAM RANGKA DIES NATALIS IPB KE-47**

**PENGARUSUTAMAAN GENDER  
DAN PEMBANGUNAN:  
PERAN KOMUNIKASI**

**ORASI ILMIAH**

**Guru Besar Tetap  
Fakultas Ekologi Manusia  
Institut Pertanian Bogor**

**Prof. Dr. Ir. Aida Vitayala S. Hubeis.**

**Auditorium Rektorat, Gedung Andi Hakim Nasoetion  
Institut Pertanian Bogor  
25 September 2010**

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



## Ucapan Selamat Datang

Yang Terhormat,

Rektor IPB

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar IPB

Ⓢ Ketua dan Anggota Majelis Wali Amanah IPB

Ketua dan Anggota Senat Akademik IPB

Para Wakil Rektor, Dekan dan Pejabat Struktural IPB

Staf Pengajar, Alumni, Mahasiswa dan Karyawan IPB

Keluarga dan Hadirin yang saya muliakan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada upacara Orasi Ilmiah dalam rangka Dies Natalis IPB ke-47.

Dalam suasana yang penuh khidmat ini perkenankan saya sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul:

### **Pengarusutamaan Gender dan Pembangunan:**

#### **Peran Komunikasi**

yang merupakan ujud perhatian dan kepedulian saya terhadap persoalan kesetaraan dan keadilan gender, dan diharapkan segala sesuatu yang akan disampaikan dapat bermanfaat dan memperkaya pemahaman pengarusutamaan gender dalam perspektif komunikasi.

Kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Ibu/Bapak/Saudara pada acara orasi ilmiah ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓢ Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



**Prof. Dr. Ir. Aida Vitayala S. Hubeis**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritika atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



## Daftar Isi

Ucapan Selamat Datang .....	iii
Foto Orator.....	v
Daftar isi .....	vii
© Daftar Gambar .....	viii
Pendahuluan .....	1
Komunikasi Politik: Pengarusutamaan Gender .....	3
Komunikasi: Isu Gender .....	7
Analisis Komunikasi: HDI, GDI dan GEM.....	10
Perspektif Komunikasi Gender: Suatu Implikasi.....	17
Daftar Pustaka .....	21
Ucapan Terima kasih .....	26
Foto Keluarga.....	31
Riwayat Hidup .....	32



## Daftar Gambar

Gambar 1	Sebaran indeks HDI dan GDI antar-tahun, 1996-2009.....	12
Gambar 2	<i>Plotting</i> HDI versus GDI provinsi .....	15
Gambar 3	<i>Plotting</i> HDI versus GEM provinsi .....	16

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar IPB.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



## Pendahuluan

Terbitnya Inpres No.9 tahun 2000 tentang PUG (Pengarusutamaan Gender) dan beragam perundang-undangan tentang perempuan dan anak serta komitmen terhadap kesepakatan internasional telah mendorong terjadinya perubahan paradigma pemberdayaan perempuan, yaitu dari WID (Women in Development) ke GAD (Gender and Development). Perubahan ini merupakan reaksi terhadap WID yang melancarkan program dan kegiatan pembangunan hanya untuk perempuan, sedang, GAD berupaya memahami subordinasi perempuan melalui analisis relasi gender.

Gender dalam konteks komunikasi menggambarkan hubungan sosial dan personal antara laki laki dan perempuan dan demikian pula dengan konsep feminin dan maskulin. Gender, dalam hal ini, merupakan produk konstruksi sosial budaya yang berhubungan dengan peran, kedudukan, dan kebutuhan baik laki-laki maupun perempuan (Fakih 1996). *Standpoint theory* (Harding 1986; Wood (2007), menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perspektif terpisah dan perbedaan hirarkhi sosial yang mempengaruhi apa yang dilihat dan dikomunikasikan karena perempuan dan minoritas lainnya mempersepsi dunia secara berbeda dari kelompok yang berkuasa, yaitu laki-laki. Dampaknya adalah perempuan terposisi pada hirarkhi lebih rendah dari laki-laki. Karena itu, sama halnya dengan perjuangan kelas (seperti filosofi kaum proletar: Karl Marx dan Friederich Engels), harus ada perjuangan terhadap diskriminasi gender.

Perjuangan gender di Indonesia tidak terlepas dari gerakan nasional, mulai dari memperjuangkan kemerdekaan, pendidikan, menyejahterakan bangsa, sampai menyukseskan Pemilu dan Pemilukada. Perjuangan wanita yang dilandasi oleh gerakan nasionalisme, *tidak kalah keras* dengan laki-laki dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

sekaligus menginformasikan bahwa perempuan bukan makhluk pasif. Namun, selama 10 tahun terakhir ini, perempuan masih menghadapi hambatan, yaitu belum diterima sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan. Hal ini terdici dari rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga kenegaraan (legislatif, eksekutif, yudikatif) di berbagai tingkat, dari desa hingga pusat (Murpratomo 2010). Dalam hal ini, budaya masih memosisikan perempuan sebagai subordinasi di dalam keluarga, sehingga menyebabkan perempuan masih harus berjuang keras di dalam melawan ideologi-ideologi *misoginis* dan patriarki yang mengakar kuat di masyarakat.

Pada masyarakat patriarki, seperti Indonesia, kontrol patriarki memang merupakan sistem monopoli atau dominasi pengambilan keputusan di setiap level pemerintahan dan kekuasaan. Kemudian, keyakinan patriarki adalah sistem yang melegitimasi dominansi laki-laki dan diskriminasi gender. Hal ini didasarkan pada interpretasi patriarki dari *sexism* yang menggugat pembagian hak yang tidak setara antargender bersifat alami, tidak perlu diubah atau sangat sulit diubah (Wolfe 1980). Selanjutnya, pencitraan peran gender atas dasar teropong *sexism* dicirikan oleh manfaat pembangunan yang lebih diposisikan dan dikontrol oleh mereka yang mendominasi publik, yaitu kaum laki-laki.

Sistem ekonomi patriarki dan politik internasional yang mensubordinasikan peran dan posisi perempuan, juga mendorong timbulnya gerakan perempuan untuk menuntut kesetaraan hak (Lasminah 2010). Menurut Antrobus (2004), karakteristik gerakan perempuan global sangat kompleks, dan belum memiliki tujuan yang jelas dan sama di dalam mengusung prioritas agenda kesetaraan. Hal ini disebabkan adanya pengalaman mereka yang beragam, perjuangan yang bersinggungan dengan ras, kelas dan politik, serta kebutuhan untuk membedakan relasi material dan ideologi gender.



Namun demikian, pada intinya sudah ada kesadaran global, termasuk di Indonesia, tentang pentingnya kesetaraan dan keadilan gender sebagai bagian dari transformasi sosial ke masyarakat. Dalam situasi ini, isu gender akan muncul jika masyarakat menyadari bahwa ketidaksetaraan adalah ketidakadilan dan kesenjangan gender yang terjadi cukup besar pada perempuan akan mengganggu aktualisasi dari hak asasi manusia pada setiap warga negara yang merdeka.

Permasalahan yang perlu dijawab dalam konteks Indonesia adalah sejauhmana pemberdayaan perempuan telah memasyarakat dan membudaya setelah 10 tahun PUG menjadi komoditi komunikasi politik? Bentuk komunikasi apa yang dinilai strategis untuk memasyarakatkannya?

## Komunikasi Politik: Pengarutamaan Gender

Komunikasi adalah proses saling berbagi informasi, gagasan atau sikap (De Vito 1995), dan politik adalah kajian tentang kekuasaan atau seni memerintah (Nimmo 2005). Dengan demikian, komunikasi politik melibatkan pesan politik dan aktor politik yang berkorelasi dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, menurut Hart (2001), pemerintah (kepala pemerintahan) memerintah melalui komunikasi, sebagai *the sound of leadership* dimana semua tindakan dan pernyataannya kepada publik dapat dikategorikan sebagai komunikasi politik.

Komunikasi politik pengarusutamaan gender dalam segala bidang pembangunan daerah sebagai bentuk *the sound of president* (leadership) dikomunikasikan melalui Inpres No.9 tentang PUG beserta pedoman pelaksanaannya<sup>1</sup>. Harapannya,

<sup>1</sup> Inpres No 9 Tahun 2000, "...menginstruksikan kepada semua pejabat, termasuk Gubernur, Bupati, Walikota untuk melaksanakan PUG guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian atas kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) kewenangan masing-masing





inferior, kurang kompeten dan kurang bernilai, terhadap seks yang lain (Arthur and Mary 1984).

Saat ini, *sexism* telah menjadi isu komunikasi politik yang mempengaruhi penggunaan bahasa komunikasi dalam mengatasi ketidakadilan atau ketidakbenaran berujar terhadap salahsatu seks, yang berbias pada sosialisasi peran dan relasi gender. Semua ini, disosialisasikan antar-generasi, mulai dari keluarga: anak laki-laki mengikuti langkah ayah dan anak perempuan mengikuti langkah ibu (Hubeis 1985).

Pada era apapun, keluarga tetap merupakan unit terkecil dari suatu sistem sosial masyarakat dan bertindak sebagai lembaga sosialisasi pertama yang mewariskan norma dan nilai-nilai bertindak kepada anggota keluarga. Sosialisasi ini akan efektif atau tidak, dapat dijelaskan dari *circumplex model of family interaction*, yaitu (1) kemampuan beradaptasi untuk mengubah dan meresponi perubahan struktur tugas dan peran, (2) ikatan emosional dan perasaan kebersamaan, dan (3) komunikasi yang menyirikan suatu keluarga kohesif.

Dalam hal ini, sosialisasi gender dalam keluarga menghasilkan suatu cara berkomunikasi spesifik perempuan dan spesifik laki-laki Berdasar hal ini, Tannen (1990), meyakini adanya gap komunikasi antara laki-laki dan perempuan, dikarenakan masing-masing berada pada posisi lintas-budaya, dimana kegagalan mengamati perbedaan cara pandang dan gaya bercakap dapat membawa masalah yang besar dalam memaknai relasi gender dalam berkomunikasi.

Selanjutnya, norma pembagian kerja dalam keluarga menghasilkan rumusan berperan atas dasar perbedaan jenis kelamin, yang menempatkan perempuan memainkan peran tradisi 3-1 (isteri, ibu rumahtangga dan ibu) dan laki-laki di publik mencari nafkah. Perkembangan zaman dan tuntutan ekonomi menyebabkan timbulnya peran transisi (peran 3-1

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikatkan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

plus peran publik) dan peran egaliter antar-anggota keluarga, laki-laki dan perempuan (Hubeis 1996a).

Pada era global, perjuangan kesetaraan gender yang semakin gencar, diprediksi akan menimbulkan hal berikut: (1) kejajegan peran tradisi atas dasar perbedaan seks akan memudar sehingga tidak jelas lagi pembedanya; (2) perempuan pekerja akan meningkat dan sebaliknya laki-laki pengangguran juga akan meningkat; (3) mobilitas sosial dan geografis memisahkan tempat tinggal suami-isteri, orangtua-anak, sehingga keluarga menjadi tidak utuh (Hubeis 1995). Berbagai kemungkinan tersebut perlu diantisipasi dalam konteks kesadaran gender di keluarga dan di masyarakat.

Dari dimensi komunikasi, keluarga adalah jaringan orang yang berbagi kehidupan dan ekspektasi masa depan mengenai relasi sosial (Tubbs and Moss 2005). Berarti, pemahaman tentang gender yang akan atau sudah terbentuk dalam suatu keluarga akan menjadi modal sosial menuju kesetaraan atau ketidaksetaraan. Dengan demikian, gender adalah kategori yang berhubungan dengan relasi sosial, ekonomi, kekuasaan dan politik (Wood 1999, Wood 2007), tidak pernah statis tapi selalu dinamis (Butler 1990).

Berdasar premis ini, sangat penting bagi para pejuang gender untuk tidak mengkategorikan gender sebagaimana yang secara historis didefinisikan tetapi perlu juga dilihat dari meningkatnya pengaruh teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal ini, menurut Lawley (1994), efek dari CMC (computer-mediated communication) dan media elektronik lain, telah mengubah konsep perseorangan dan masyarakat tentang perbedaan gender. Namun, setiap bangsa, suku dan budaya di belahan dunia ini memiliki suatu kesamaan umum, ada laki-laki dan ada perempuan. Karena itu, keberhasilan pengarusutamaan gender di berbagai lini kehidupan dan pembangunan akan tergantung pada komunikasi efektif di antara keduanya, laki-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak mengalkan kepentingan yang wajar. IPB.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

laki dan perempuan. Selanjutnya adalah, bagaimana aparat pemerintah mempersepsikan gender dalam komitmennya terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagai komitmen politik yang telah disepakati.

## Komunikasi: Isu Gender

Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi dari suatu sumber pesan ke penerima pesan (De Vito, 1995). Keberhasilan proses komunikasi tidak hanya tergantung pada keberhasilan pengalihan pesan dari satu pihak ke pihak lain, tetapi lebih dari itu, sangat ditentukan oleh bagaimana proses komunikasi tersebut menghasilkan pemahaman timbal-balik di antara partisipan komunikasi. Pemahaman bersama, kemudian, menghasilkan persetujuan bersama, yang selanjutnya akan menghasilkan aksi bersama (Rogers 1981). Dalam konteks pengarusutamaan gender, inti utama pelaksanaan Inpres No.9 Tahun 2000, salahsatunya adalah aksi bersama, terbentuknya kelembagaan pemampuan PUG.

Namun demikian, studi di 5 departemen pemerintah (Hubeis 2004) dan di 9 departemen (Bappenas dan KNPP RI 2006) menunjukkan bahwa kelembagaan PUG departemen sangat beragam, mulai dari berbentuk unit kerja, Tim atau panitia khusus PUG atau bersifat proyek, atau Pokja PUG. Kesamaannya, ada pada pelaksanaannya yang *hanya* berada di bawah satu direktorat jenderal atau satu ke deputian yang dianggap berhubungan dengan pemberdayaan perempuan, sesuai *Tipoksi* departemen. Berarti, PUG belum terintegrasi di keseluruhan program departemen, dan belum memiliki aura kekuasaan untuk membuat kebijakan karena pelaksana. dalam hal ini, unit pemberdayaan perempuan, bukan dari eselon penentu kebijakan.

Persoalan mendasar berikut terletak pada kenyataan bahwa sebagian besar aparat yang menangani penganggaran tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak mengalkan kepentingan yang wajar. IPB.  
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

mengetahui sama sekali pengertian tentang gender. Kalaupun mereka paham, belum mampu menggunakan *gender lens* (kacamata gender) untuk menentukan prioritas program berbasis anggaran responsif gender yang berakibat pada perempuan sebagai pihak yang pertama dirugikan. Karena itu, terdapat kesenjangan perspektif gender, di tingkat perumusan program maupun penganggaran (WRI 2010; Bappenas 2008).

Pelaksanaan pengarusutamaan gender ke daerah dikomunikasikan melalui Kepmendagri No.32 Tahun 2003, yang kemudian direvisi dengan PermenDDN No.15 Tahun 2008, sebagai bentuk komitmen politik mengarusutamakan gender ke dalam semua aspek pembangunan daerah, termasuk alokasi anggaran responsif gender. Namun, dalam kenyataan, masih banyak daerah yang belum memiliki komitmen kebijakan, kelembagaan pemampuan PUG, anggaran PUG<sup>2</sup>, dan ketersediaan data terpilah jenis kelamin. Intinya, seperti ucapan Meutia Hatta (Suara Karya 2005) adalah:

*"...belum ada satupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang secara sempurna menerapkan Inpres No.9 Tahun 2000 dikarenakan minimnya pendirian Biro Perempuan di kantor Pemda serta rendahnya alokasi anggaran untuk program pemberdayaan perempuan"*.

Setelah lima tahun berlalu, suara senada tentang kelembagaan pemampuan PUG juga masih kerap dikeluhkan berbagai aparat, sebagai bukti bahwa persoalan tersebut belum selesai.

Hasil studi evaluasi terhadap pelaksanaan Inpres No.9 Tahun 2000 di 10 provinsi (KNPP 2006) juga menemukan bahwa struktur kelembagaan pemberdayaan perempuan di daerah merupakan faktor yang krusial di dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender. Kelembagaan yang hanya bersifat biang atau kegiatan sulit melakukan kegiatan apapun (Hubeis, AV 2004, Bappenas 2008). Apalagi jika pejabat atasannya

<sup>2</sup>Dimulai sejak tahun 2010 PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsif Gender) sudah menjadi agenda nasional dan dalam proses pensosialisasiannya ke daerah-daerah oleh KemeneqPP&PA.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak mengiklankan kepentingan yang wajar. IPB.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

tidak paham gender. Selain itu, ketidakterediaan *data terpilah per jenis kelamin* dan data akurat tentang masalah gender per spesifik lokasi merupakan hambatan lain, bagi sektor dan daerah, untuk dapat melakukan suatu analisis gender yang akurat (Hubeis *et al.* 2006).

Kemudian, salahsatu dari tiga rumusan isu nasional pengarusutamaan gender RPJMN 2010, juga ditujukan pada peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan. Berarti, pemampuan kelembagaan PUG daerah memang merupakan faktor krusial keberhasilan komunikasi pengarusutamaan gender.

Hasil studi evaluasi pelaksanaan PUG di pusat dan di daerah yang telah dilakukan oleh KNPP, sejak tahun 2002-2006, menunjukkan bahwa sebagian besar aparat, belum memahami PUG serta cara melakukannya. Bahkan terkesan, seakan-akan urusan pengarusutamaan gender hanya sebagai pekerjaan Badan atau Kantor atau Biro PP (Pemberdayaan Perempuan). Selain itu, upaya penyadaran gender (sosialisasi, pelatihan, advokasi) di daerah juga terbatas pengadaannya karena kekurangan biaya (KNPP 2006a). Untuk mengatasi hal ini, alokasi dana stimulan ke daerah-daerah, termasuk kepada LSM peduli gender atau perempuan, telah dilakukan KNPP untuk membantu daerah melakukan *penyadaran gender* di lingkup pemerintahan tentang perlunya pengintegrasian gender dalam setiap lini pembangunan dengan lebih intens<sup>3</sup>. Akan tetapi, hasil penyadaran gender tersebut kerap terputus karena mereka yang sudah *paham gender* dimutasi atas alasan struktural dan di posisi yang baru tentunya harus bekerja sesuai Tupoksi unit kerjanya yang tidak selalu terkait dengan persoalan dan permasalahan gender<sup>4</sup> (Hubeis, AV, 1996b).

<sup>3</sup> Dana stimulan sudah dihentikan sejak Tahun 2010.  
<sup>4</sup> Merupakan catatan dan pengamatan personal penulis selama berkeliling ke berbagai provinsi, kabupaten dan kota ketika menjabat Ketua Tim Independen Penilai pemberian Gender Awards, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (KNPP), Tahun 2004-2007

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak mengalkan kepentingan yang wajar. IPB.  
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Penelitian dari WRI (2010), juga menunjukkan bahwa pemahaman umum mengenai gender masih kerap disamakan dengan jenis kelamin, yang akhirnya hanya dialamatkan pada isu mengenai perempuan, ketimbang konstruksi sosial dan budaya yang menyebabkan terjadinya perbedaan peran perempuan dan laki-laki. Dalam praktik, hal itu cenderung mendiskriminasi perempuan dalam bidang apapun, sehingga kesejahteraan perempuan jauh lebih buruk dari laki-laki (Hubeis, *et al.* 2007; Hubeis, 2007).

Untuk meningkatkan kesadaran pemerintah daerah tentang pentingnya integrasi PUG dalam semua sektor, mulai tahun 2004, KNPP mengadakan evaluasi pelaksanaan PUG melalui pemberian APE (Anugerah Parahita Eka Prakarya)<sup>5</sup>, kepada kepala provinsi, kabupaten/kota. Pada tahun pertama penilaian, daerah yang dapat mengisi form evaluasi APE sangat sedikit (kurang dari 30%)<sup>6</sup>. Bahkan tidak ada satupun yang dapat memenuhi kriteria di atas Pratama<sup>7</sup>. Namun, secara tidak langsung, pemberian APE menyadarkan banyak pihak tentang belum sempurnanya pelaksanaan PUG di daerah mereka. Hal ini memotivasi daerah, yang salahsatunya tercermin dari mulai banyaknya daerah, sejak 2006, yang membentuk Badan atau Kantor atau Biro PP sebagai respons positif terhadap program APE dari KNPP.

## **Analisis Komunikasi: HDI, GDI dan GEM**

Isu ketidappahaman aparat, termasuk masyarakat tentang konsep gender dan program pengarusutamaan gender

<sup>5</sup>Pemberian APE didasari oleh hasil penilaian aspek kelembagaan, komitmen, dukungan forum, pemampuan PUG, data gender dan keberhasilan program (success story). Penilaian dilakukan oleh Tim independen: Penulis adalah Ketua Tim independen APE dengan SK Menteri. Pada tahun 2004-2007.

<sup>6</sup>Pada tahun berikutnya jumlah provinsi (45%), kabupaten (28%) dan kota (44%) yang memasukkan formulir APE semakin meningkat.

<sup>7</sup>Kriteria pemberian APE mulai dari yang terendah sampai tertinggi adalah: Pratama, Madya dan Utama.



menunjukkan ada *komunikasi keliru* dalam penyosialisasian gender ke publik. Menurut paham teori komunikasi klasik dan kontemporer, asumsi yang mendasari komunikasi gender adalah *epistemic* dan *axiology*: Asumsi *epistemic* menyatakan bahwa komunikasi adalah media yang membuat orang menjadi tahu, tertarik dan mau menerima.

Pendapat ini senada dengan McLuhan (1964), yang menyebutkan bahwa *the medium is the message it self*, yang berarti bentuk suatu media yang dipakai akan menimbulkan relasi simbiosis dan mempengaruhi penerimaan pesan yang dikomunikasikan. Selama ini, masyarakat memahami gender sebagai perempuan (WRI 2010), dan berasal dari budaya atau bahasa asing (Hubeis 2006) sehingga kerap menimbulkan perlawanan atau *sinisme* bahasa (Gudykurst 2003). Berarti ada penggunaan media atau kemasan pesan komunikasi yang belum menyatu dengan nilai budaya bahasa di masyarakat

Asumsi *axiology* menyatakan komunikasi sebagai *value-laden* dimana unsur bahasa menjadi subyektif dan tidak satupun bahasa bersifat netral. Dalam hal ini, Weaver (1976) dan Winterrowd (1978), juga menyatakan bahwa komunikasi menampilkan perilaku yang diikuti oleh tindakan yang menyangkut konsekuensi moral dan tanggungjawab moral. Jadi, ketika PUG yang belum akrab di telinga dan di kalbu banyak orang di republik ini disuarakan dan dikomunikasikan sebagai upaya penyeteraan gender maka yang timbul adalah penerimaan setengah hati atau sepertiga hati atau bahkan perlawanan tersembunyi. Hal ini terkait dengan budaya patriarki yang masih memposisikan perempuan berbeda dari laki-laki, perempuan di domestik dan laki-laki di publik.

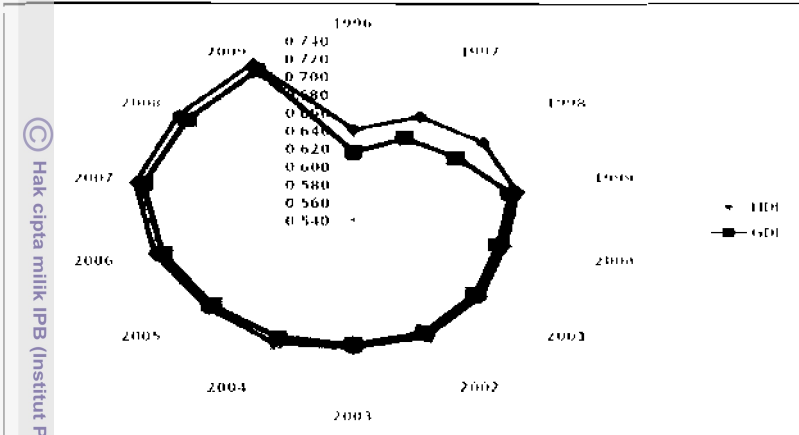
Dengan demikian, dapat diproposisikan bahwa suatu keberhasilan atau ketidakberhasilan komunikasi politik pengarusutamaan gender dapat dilihat dari ada tidaknya gap pemaknaan komunikasi, yang diidikasikan oleh kesenjangan

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengiklankan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

gender, yang dalam hal ini, dapat dinilai dari selisih perhitungan antara HDI (Human Development Index)<sup>8</sup> dan GDI (Gender-related Development Index)<sup>9</sup>.



Gambar 1 Sebaran indeks HDI dan GDI antar-tahun, 1996-2009

Sumber: Human Development Report, UNDP: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007/2008, 2009; diolah

Pada grafik perbandingan HDI-GDI antar tahun (1996-2009) tampak nilai HDI selalu menempati posisi lebih tinggi dari GDI. Dari sisi *trend*, nilai HDI dan GDI memiliki *trend* positif. Kedekatan grafik HDI ke GDI mulai terjadi setelah dua tahun pengarusutamaan gender menjadi komoditi komunikasi politik. Sebaran indeks antar tahun memiliki capaian yang relatif sama: Pada Tahun 2009 kedua indeks mencapai nilai tertinggi, dan pada Tahun 1997-1998 kedua indeks memiliki perbedaan yang signifikan.

Angka perbedaan tertinggi terjadi pada Tahun 1998, dengan selisih indeks hingga 0.028, bertepatan dengan krisis ekonomi. Pada saat krisis dan selama krisis (tahun 2000), angka

<sup>8</sup>HDI difokus pada tiga dimensi ukuran pembangunan manusia: usia panjang dan hidup sehat, terdidik dan memiliki kehidupan yang layak.

<sup>9</sup>GDI yang diperkenalkan dalam HDR tahun 1995, mengukur prestasi pembangunan dalam dimensi indikator seperti di HDI.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

HPI (Human Poverty Index) juga tinggi (27,7%) dan terus menurun hingga 17,00% pada Tahun 2007. Bersamaan dengan menurunnya HPI, angka GDI menaik secara curam terhadap HDI sebagai indikasi kesenjangan gender mengecil.

Dengan demikian, penurunan angka kemiskinan dan perbaikan ekonomi nasional akan mengurangi kesenjangan gender. Selanjutnya, dapat dikatakan di sini bahwa *sasaran pertama pengarusutamaan gender untuk meningkatkan kesetaraan gender* bukanlah semata-mata menjadi urusan KNPP&PA, tetapi merupakan tanggungjawab semua kementerian di Republik ini, dan termasuk masyarakat luas, akademisi, LSM dan organisasi wanita.

Untuk melengkapi pengukuran kesenjangan gender, berikut ini adalah hasil analisis perkembangan GEM (Gender Empowerment Measure)<sup>10</sup> yang juga menunjukkan *trend* kenaikan positif, yaitu dari nilai 54,6 (Tahun 2002), menjadi 59,7 (Tahun 2005), 61,3 (Tahun 2006), 61,8 (Tahun 2007) dengan posisi ke 33 dari 71 negara yang diukur. Lalu, pada tahun 2008 meningkat ke 62,27 (UNDP, HDR 2002-2008).

Peringkat ke-90 (0,408) dari GEM Indonesia pada tahun 2009 sudah menunjukkan harapan target pemerintah, seperti dinyatakan oleh Presiden SBY, agar angka GEM Indonesia dapat mencapai urutan ke-91 di Tahun 2010. Namun demikian, membanding dengan peringkat GEM negara-negara Asean (UNDP-HDR 2009), seperti Singapura ke-16 (0,786), Philipina ke-59 (0,560), Vietnam ke-62 (0,554), Malaysia ke-68 (0,542), dan Thailand ke-76 (0,514) maka *ranking* GEM Indonesia masih relatif sangat rendah.

Meningkatnya angka GEM nasional diikuti dengan pencapaian GEM di beberapa provinsi melebihi rata-rata angka nasional.

<sup>10</sup>GEM, merupakan indeks komposit yang mengukur ketidaksetaraan gender (gender inequality) pada tiga dimensi dasar pemberdayaan, yaitu partisipasi ekonomi dan politik serta pengambilan keputusan

Namun, jumlahnya sangat berfluktuasi, yaitu dari 10 provinsi, menjadi 18, menurun menjadi 13 dan 8 lalu meningkat menjadi 11 provinsi, berturut-turut di tahun 2002, 2005, dan 2007-2009<sup>11</sup>. Berarti pada Tahun 2009 terjadi peningkatan partisipasi perempuan di politik dan di lembaga pengambilan keputusan, salahsatunya adalah meningkatnya 10,7 persen perempuan di DPR (Tahun 2004) menjadi 18,2 persen (Tahun 2009).

Secara keseluruhan, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai kelembagaan masih rendah, yang diindikasikan oleh rendahnya keterwakilan perempuan di DPR (18,2%) dan posisi kepemimpinan di Parpol (antara 6,25%-22,25%). Semua ini, masih jauh dari minimal *quota affirmative action* (30%), seperti diamanatkan pada UU Pemilu No.10 Tahun 2008 dan UU No.2 Tahun 2008 tentang Parpol.

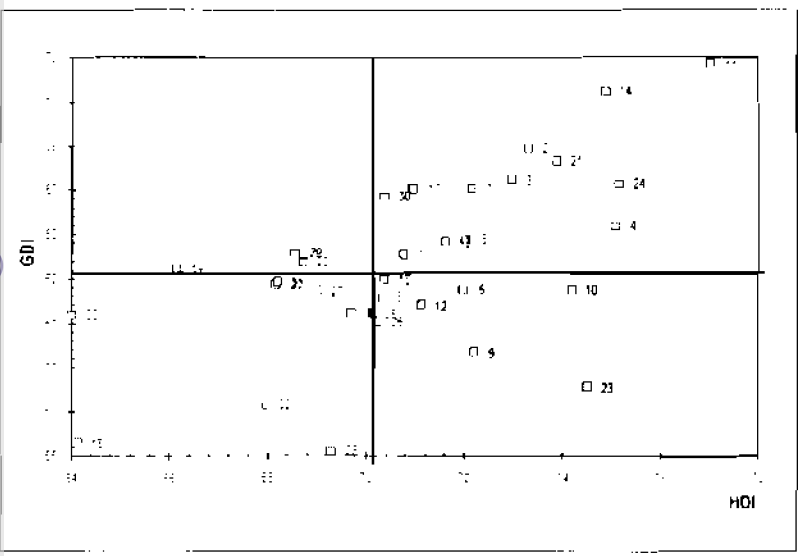
Selanjutnya, keterwakilan perempuan di lembaga formal pengambil keputusan juga masih rendah, seperti di MPR (1%), DPD (21%), MA (15%), BPK (0,0%), KPU (18%), dan Menteri (12%); Rendahnya perempuan PNS di posisi jabatan struktural Eselon 1 (7,85%), yaitu di LPD (8,96%), Lembaga Tinggi Negara dan Kejaksaan (6,67%), kelembagaan kepresidenan (3,23%), Menteri (12,83%), dan di LPND (7,85%); Sumber: KPU 2009-2014, BKN 2008, Sekab RI Agusutis 2008 (diolah). Partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang rendah, pada perempuan, merupakan indikasi kuat dari masih terdapatnya kesenjangan gender dalam aspek kekuasaan.

Untuk mengetahui hubungan antar-indeks kesenjangan gender, dilakukan *plotting* angka HDI, GDI dan GEM untuk tiap provinsi. Sumbu X dan Y merupakan rata-rata angka HDI atau GDI atau GEM untuk semua provinsi. Titik-titik dalam area merupakan posisi suatu provinsi.

<sup>11</sup>Diolah dari data 33 provinsi pada Tahun 2000-2006, 2007/2008, 2009; bersumber dari UNDP Human Development Report, UNDP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;  
b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar IPB.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

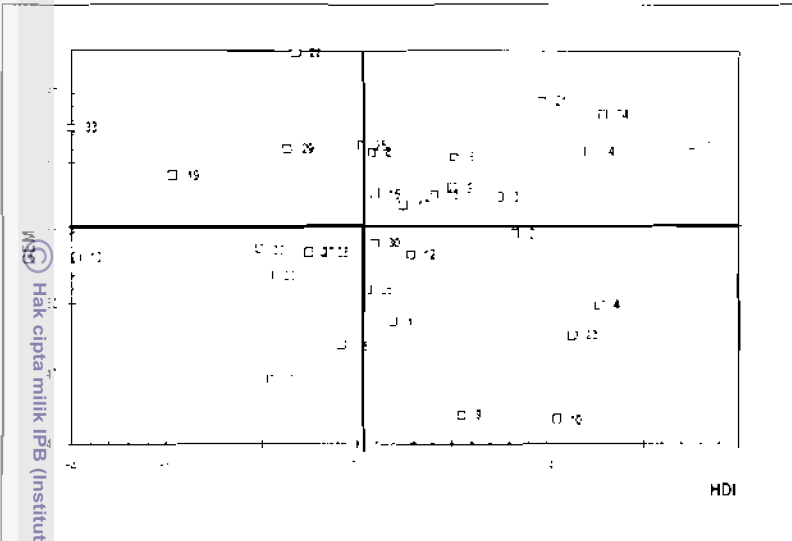
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar IPB.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Gambar 2. *Plotting* HDI versus GDI provinsi

Keterangan: Nomor provinsi: 1:NAD, 2:Sumut, 3:Sumbar, 4:Riau, 5:jambi, 6:Sumsel, 7:Bengkulu, 8:Lampung, 9:Babel, 10:Kepri, 11:DKI, 12:Jabar, 13:Jateng, 14:DIY, 15:Jatim, 16:Banten, 17:Bali, 18:NTB, 19:NTT, 20:Kalbar, 21:Kalteng, 22:Kalsel, 23:Kaltim, 24:Sulut, 25:Sulteng, 26:Sulsel, 27:Sultra, 28:Gorontalo, 29:Sulbar, 30:Maluku, 31:Malut, 32:Irjabar, 33:Papua (diolah dari UNDP HDR 2010).

Gambar 2 menunjukkan provinsi dengan HDI tinggi (DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Sumut, Sumbar, Kalsel, Sulut, Bali, Bengkulu) juga memiliki GDI tinggi. Sebaliknya, daerah dengan HDI di bawah rata-rata nasional (Irjabar, Papua, NTB, Maluku, Kalbar, Sultra) juga memiliki GDI rendah.



Gambar 3 *Plotting* HDI versus GEM provinsi

Keterangan nomor provinsi sama dengan Gambar 4

Gambar 3 menunjukkan sebagian besar provinsi memiliki angka GEM di atas rata-rata nasional. Akan tetapi, hubungan HDI dan GEM cenderung tidak konsisten yang berarti bahwa provinsi dengan HDI tinggi tidak selalu memiliki GEM yang tinggi (misalnya, Jatim, Jambi). Bahkan, Papua, NTT, Kalsel dengan HDI lebih rendah dari rata-rata nasional justru memiliki angka GEM yang tinggi.

Selanjutnya, berdasarkan angka HDI, GDI dan GEM terkait dengan dimensi komunikasi gender maka kesenjangan gender yang terjadi dapat di rekap sebagai berikut.

1. Menyempitnya gap HDI dan GDI sebagai informasi berkurangnya kesenjangan gender terkait dengan variabel meningkatnya GDP dan menurunnya HPI. Tetapi, meningkatnya GEM tidak selalu mengkomunikasikan adanya peningkatan angka HDI.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak mengalkan kepentingan yang wajar IPB.  
 2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

2. Keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan sudah meningkat dilihat dari sudut jumlah, namun belum memenuhi *quota affirmative action*.
3. Peningkatan angka GEM tidak selalu diikuti dengan kenaikan angka HDI dan menyempitnya gap antara HDI-GDI.

## Perspektif Komunikasi Gender: Suatu Implikasi

Isu-isu yang terkuak dari hasil analisis HDI, GDI dan GEM, dari dimensi komunikasi makro, memerlihatkan bahwa kesadaran gender sebagai prasyarat penting komunikasi politik pengarusutamaan gender, ternyata belum sepenuhnya menjadi kesadaran publik. Dalam hal ini, keluarga sebagai sistem sosial terkecil merupakan awal mulanya relasi gender disosialisasikan. Dalam fungsi sebagai jejaring komunikasi, keluarga juga berperan sebagai pemantap ideologi patriarki dan *sexism* ke masyarakat. Berarti, komunikasi politik pengarusutamaan gender belum sepenuhnya menyentuh kelompok *grass root*.

Kegagalan komunikasi politik di tingkat birokrat terlihat dari isu strategis gender yang belum terarusutamakan ke dalam setiap level dan lini kebijakan birokrasi. Akibatnya, masih terjadi bias laki-laki yang menomorduakan perempuan di berbagai bidang kehidupan. Dogma patriarki yang juga belum berhasil dilepaskan sepenuhnya oleh berbagai bentuk komunikasi dan advokasi gender menyebabkan kesenjangan gender pun belum sepenuhnya berhasil dicapai, sesuai harapan nasional atau komitmen pada kesepakatan global.

*Pertanyaan adalah apakah perspektif komunikasi yang tepat sebagai strategi komunikasi gender?*

Keyakinan pertama yang perlu disepakati untuk menjawab pertanyaan ini adalah pemahaman tentang *domain domestik* dan *domain publik* atau *latent issues* dan *current issues*, sebagai prasyarat awal penanganan isu-isu gender dan penyusunan rancangan strategi komunikasi berperspektif gender. Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa apapun dan bagaimanapun relasi gender masih merupakan konstruksi budaya yang diwarnai oleh ideologi dan budaya patriarki. Berarti perjuangan kesadaran gender bukan hanya dimiliki perempuan dan oleh perempuan, tetapi juga untuk laki-laki dan dari laki-laki, dan atau untuk kepentingan bersama.

Karena itu, kesadaran gender melalui komunikasi partisipatif yang memadukan konsep dialog *Freire* (1975) dengan keputusan *kolektif* Servaes (2002), sebagai suatu preposisi diyakini akan membuat seseorang atau sekelompok orang berdaya. Raggatt (2007), dalam teori *positioningnya* juga menekankan bahwa upaya keberdayaan terletak pada proses *conversational* dan dialektika. Namun, menurut Melkote dan Steeves (2001), pengorganisasian dialog tentang kesepakatan ketidakadilan kekuasaan harus tetap merupakan masalah sentral yang perlu disolusikan dalam pembangunan berkesetaraan gender.

Dengan demikian, intervensi kesadaran gender sebagai proses dialog adalah bagaimana memposisikan perempuan dan laki-laki agar dapat bersama-sama mencapai kontrol pengambilan keputusan publik, mengubah praktik-praktik serta perundang-undangan bias gender yang tidak menguntungkan salahsatu seks. Dengan kata lain, visi dan misi pengarusutamaan gender dalam pembangunan tetap perlu disosialisasikan dan didisyratkan, tidak hanya agar terinternalisasi dalam setiap kabinet aparat penentu kebijakan tetapi juga di kalbu seluruh anak bangsa, laki-perempuan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar IPB.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Selanjutnya, kaidah komunikasi *dialog-partisipatif*, mensyaratkan pertautan senada semua partisipan komunikasi (sumber, media, pesan dan penerima pesan) sebagai inti dari proses *gender conscientization* (penyadaran gender). Karena itu, kemampuan kelembagaan pemberdayaan gender dan ketersediaan sumberdaya manusia ahli media dan ahli komunikasi yang dapat mengkemas isu-isu gender spesifik lokasi dan budaya serta cara berbahasa akan menjadi energi pendorong (*energy forces*) dalam proses *memasyarakatkan gender dan menggenderkan masyarakat*.

Mengingat keluarga sebagai awal peletakan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan terhadap sesama, maka penumbuhan pemahaman suatu keluarga tentang gender merupakan modal sosial dalam menumbuhkan empati sosial terhadap makna kesetaraan dan keadilan gender. Tetapi, pencapaian banyak keluarga, yaitu masyarakat luas dengan keragaman etnis, budaya dan keyakinan memposisikan penggunaan teknologi informasi yang komunikatif sebagai alternatif strategi komunikasi untuk percepatan intervensi penyadaran gender ke publik, terutama menghadapi eksis negatif kekeliruan pemahaman tentang kesetaraan gender.

Dengan demikian, isu-isu kesenjangan gender sebagai bagian *komunikasi politik* memperlihatkan bahwa intervensi gender atau *gender affirmative action* tidak dapat dicapai hanya dengan komunikasi *top down*. Perlu ada revitalisasi dua-arah tentang pemahaman gender: Dari sisi birokrasi, komunikasi politik masih perlu diperbaiki melalui pendidikan dan pelatihan ke semua birokrat di semua jenjang birokrasi; Dari sisi masyarakat, perlu dibuka ruang komunikasi publik sebagai media perbincangan kesetaraan gender secara kritis.

Untuk mempercepat semua ini, sistem pendidikan formal perlu mengkorporasikan unsur pluralisme kesetaraan. Secara

lebih spesifik, di dalam pluralisme budaya, adat, kesukuan, dan keyakinan maka menjadi penting peran tokoh masyarakat (tokoh agama dan tokoh adat) lebih dipertautkan ke dalam upaya penyadaran dan penginternalisasian ideologi gender. Dengan demikian, unsur pendidikan dan komponen adat serta keyakinan yang acap merupakan *energi politik* (political forces) dalam pelancaran kekuasaan dapat disimbolkan sebagai tungku kakitiga dalam mengurangi konflik politik budaya patriarki, maskulinitas dan *sexism*, yang suka atau tidak suka merupakan komponen pencetus dan pengukuh perbedaan gender, yang akhirnya bermuara pada kesenjangan gender yang ajeg. Rancangan UU kesetaraan gender yang sudah menjadi agenda DPR, sebagai *legal aspect* yang akan lebih mengukuhkan perlunya kesetaraan gender, dengan demikian, juga perlu dibarengi dengan pengukuhan *social aspect* di masyarakat melalui keterlibatan aktif berbagai tokoh masyarakat sebagai pemegang legitimasi budaya.

Sebagai penutup, sudah saatnya perjuangan berkesetaraan dalam berbagai bidang kehidupan (pendidikan, kesehatan dan pendapatan layak) yang selama ini lebih banyak disuarakan oleh perempuan disambut dengan lapang dada oleh semua pihak. Perguruan tinggi, sebagai tempat berkumpulnya para cendekiawan dan ilmuwan sudah saatnya juga bertanya "... *sudahkan kami sadar gender*".

Dalam hal ini, Institut Pertanian Bogor, sebagai salahsatu *Centre of Excelent University* di Indonesia sangat tepat untuk mulai memelopori pengintegrasian isu-isu gender ke dalam proses pembelajaran di berbagai strata pendidikan sesuai dengan bidang ilmunya, *road-map* penelitian dan pengabdian pada masyarakat berperspektif pada kesetaraan gender, selain penguatan kelembagaan penelitian terkait pada eksplorasi isu-isu gender, baik yang merupakan isu yang sudah lama terjadi (latent issues) maupun yang merupakan isu-isu hangat kekinian (current issues).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengiklankan kepentingan yang wajar. IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

## Daftar Pustaka

- Antrobus, Peggy 2004. *The Global Women's Movement: Definitions and Local Origins*. dalam Peggy Antrobus (ed), *The Global Women's Movement: Origins, Issues and Strategics*, 2004, London & New York: Zed Books.
- © Arthur and Mary. 1984. *Sexism, Racism, dan Oppression*. Blackwell in Oxford, UK, New York, NY.
- © Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor) Bappenas. 2008. *Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Rangka Background Study Persiapan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014*. Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Bappenas, Tahun 2008
- Bappenas dan KPP RI (2006). *Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di 9 Sektor Pembangunan*. Jakarta 2006-2006.
- Butler, J. 1990. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. Routledge.
- De Vito, J. A. 1995. *The Interpersonal Communication Book* 7ed. Harper Collins College Publisher.
- Fubanks, Ralph T. 1980. "Reflections on the Moral Dimension of Communication." *Southern Speech Communication Journal* 45 (1980), 297-312.
- Fakih, Mansour. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Foucault, Michel. 1990. *The History of Sexuality: An Introduction: Volume I*. Vintage Books.
- Freire, Paulo. 1972. *Cultural Action for Freedom*. Penguin Education Harmonds Worth, Penguin.

- Gudykunst, W.B. 2003. *Cross-Cultural Communication and Intercultural Communication*. Sage Publication. Thousand Oaks, London.
- Harding, Sandra. 1986. *The Science Question in Feminism*. Ithaca, New York Cornell University Press.
- Hart, Roderick P. and Bartholowew, H.P. 2001. *Politics, Discourse, and American Society: New Agenda*. Publ. the USA by Rowman & Littlefield Publ. Inc. Boston
- Hubeis, A.V.S. 2007. Implementasi PUG dalam Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan. Kementerian Negara pemberdayaan Perempuan. Oktober 2007.
- Hubeis, A.V.S., Yulfitra R., Nardho G. 2006. *Penyusunan Panduan Kategorisasi Kebijakan, Program, Kegiatan dan Anggaran Pembangunan yang Berperspektif Gender*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Jakarta 2006.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Program PUG Dalam Pembangunan Nasional*. Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Januari 2004.
- \_\_\_\_\_. 1996a. *Sosialisasi Konsep Jender dalam Dunia Pendidikan Tinggi untuk Meningkatkan Kemitasejajaran Pria dan Wanita Sebagai Sumberdaya Pembangunan*. Makalah Orientasi tentang Jender dan Pembangunan; Departemen Wanita ICMI Pusat, Jakarta
- \_\_\_\_\_. 1996b. *Bias Feminisme: Pergeseran Nilai-Nilai Kewanitaan*. Makalah seminar tentang Wanita dalam rangka Menyambut Hari Ibu. Diselenggarakan oleh Pesantren Al Ummah bekerjasama dengan ICMI Orwil Bogor, Cibadak-Sukabumi, 6 Januari 1996.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Posisi dan Peran Wanita Dalam Era Globalisasi*. Makalah disampaikan pada seminar ilmiah Puslit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian, Departemen Pertanian.

\_\_\_\_\_. 1991. *The Socio-Economic Role of Women in The Sulawesi Regional Development Project: Sanrego & Gulamas*. Canadian Cataloguing in Publ. Data. ISBN 0-88955-310-6; ISSN 11 92-1439; #1.

\_\_\_\_\_. 1985. *Women, food, an health development-cases study of Cipari Village- West Java Indonesia*. [disertasi]: Bogor Agricultural University.

KNPP RI. 2006. *Laporan Evaluasi Pengarusutamaan Gender di 10 Propinsi di Indonesia*. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Jakarta..

\_\_\_\_\_. 2006a. *Studi Evaluasi Pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender (PUG) di beberapa Dacrah Sampel Kabupaten/Kota*, KNPP RI, 2006.

Lasminah, U. 2010. [Patriarki Dunia Mengerus Indonesia](#) Posted on May 5, 2010 by wartafeminis.

Lawley, Elizabeth Lane . 1994. *The Sociology of Culture in Computer-Mediated Communication: An Initial Exploration*. Submitted in partial fulfillment of the requirements for LS695 Seminar in Research Design

McLuhan. 1964. *Understanding Media. The Extensions of Man*. New York: New American Library.

Melkote, S. R. & Steeves, H.L. 2001. *Communication for Development in the Third World: Theory and Practice for Empowerment*. New Delhi: Sage..

Mitragender. 2010. *Kesimpulan dan Rekomendasi Temu Nasional Prestasi Perempuan Indonesia dalam Dialog Publik Percepatan Undang-Undang Kesetaraan Gender ke DPR RI*. Jakarta 29 Juli 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



- Moser, Caroline O.N. 1993. *Gender Planning and Development: Theory, Practice & Training*, Routledge, London and New York.
- Moser, Caroline. 1989. *Gender Planning in the Third World: Meeting Practical and Strategic Gender Needs*. *World Development*, Vol. 17, No. 11.
- Murpratomo, Sulasikin. A. 2010. *Agenda Strategis Pemerintahan Baru Terkait Peran dan Pemberdayaan Perempuan*. The Habibie Centre, Jakarta.
- Ninmo, Dan. 2005. *Political Communication and Public Opinion*. Good Year Publishing Company, California.
- Patuwansa, K.I. 2003. *Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Seminar Pemberdayaan Perempuan. Bali, 2003. 27 Agustus 2010.
- Raggatt, P.T.F. 2007. *Forms of Positioning in the Dialogical Self: A System of Classification and the Strange Case of Dame Edna Everage*. *Theory Psychology*. [terhubung berkala] 31 Oktober 2008.
- Rogers, Everett M dan D.Lawrence Kincaid. 1981. *Communication Nerwork. Toward a New Paradigm for Research*. The Free Press. New York.
- Servaes, Jan. 2002. *Communication for Development: one world, multiple cultures*. Second Printing. Hampton Press, Inc. Cresskill, New Jersey.
- Suarakarya. 2005. *Penduduk Dunia 2005 Perempuan dan Pengentasan Kemiskinan*. <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=124384>.
- Tannen D. 1990. *You just don't understand: Women and men in communication*. New York: Ballantine Books.

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak mengalkan kepentingan yang wajar IPB.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Tubbs SL, Moss S. 2005. *Human communication*. 8<sup>th</sup> Edition. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.

Van Dijk, Teun. 1993. *Discourse And Society: Vol 4 (2)*. London, Newbury Park and New Delhi: Sage.

Weaver, Richard. 1976. *Language is Sermonic*. In *The Rhetoric of Western Thought* . Eds. James Golden, et al. Dubuque, IA: Kendall/Hunt, 1976.

Winterowd, Ross W. 1978. *Rhetoric: A Synthesis*. New York: Holt, Rinehart, & Winston.

Wolfe, Susan. J. 1980. *Constructing and Reconstructing Patriarchy: Sexism and Diachronic Semantic*. In: *Research on Language and Social Interaction*, volume 13, issue 2.

Wood J.T. 2007. *Communication, gender, and culture*. Belmont: Thomson Wadsworth.

WRI. 2010. *Studi Dampak Advokasi Anggaran Berkeadilan Gender*. Women Research Institute (WRI). Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengaitkan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



## Ucapan Terima kasih

Segala puji dan syukur, dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, atas karunia nikmat hidup dan kehidupan yang telah diberikan kepada saya selama ini. Semoga Allah senantiasa memberi petunjuk dan bimbingNya. Amin.

Ucapan terima kasih disampaikan pada Tim Penilai Usulan Jabatan Akademik Guru Besar di Departemen Sains KPM FEMA, Senat Guru Besar dan Dekan FEMA yang telah mengusulkan saya untuk memperoleh jabatan akademik Guru Besar Tetap di bidang Ilmu Komunikasi Gender.

Ucapan terima kasih, disampaikan kepada Rektor IPB Prof. Henry Suhardiyanto beserta para wakil rektor, Ketua Dewan Guru Besar IPB Prof. Endang Suhendang dan jajarannya, Dekan FEMA Dr. Arif Satria, Ketua dan Sekertaris Dep. KPM FEMA, dan semua panitia Orasi Ilmiah, yang diketuai oleh Dr. Drajad Martianto.

Perjalanan hidup saya sebagai akademisi, tidak terlepas dari jasa Prof. Sayogyo dan Prof. Margono Slamet sebagai pembimbing skripsi saya di strata 1 yang kemudian mempercayai saya untuk menjadi asisten beliau dan mendorong saya untuk menjadi dosen di jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian (Sosek) Fakultas Pertanian IPB. Untuk itu, ucapan terima kasih tak terhingga patut disampaikan kepada beliau-beliau ini.

Kepada Prof. Dr. Scarlett Epstein yang telah memberi kesempatan saya mempelajari women's studies di Sussex University Brighton England sebagai pra-doctorate student dan kemudian sebagai Independent Student untuk mendalami isu-isu perempuan disampaikan ucapan terima kasih. Pengalaman indah yang kemudian menggiring saya menekuni studi wanita. Ucapan terima kasih yang mendalam dan tak terhingga disampaikan kepada para pembimbing Program Doktor di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar IPB.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
IPB Institut Pertanian Bogor  
Bogor Agricultural University



program studi penyuluhan dan komunikasi Pembangunan, yaitu Prof.Margono Slamet sebagai ketua, dan Prof.Scarlett Epstein, Prof. Affendi Anwar, Prof. Syarifuddin Baharsyah, serta Prof.Melly G. Tan sebagai anggota. Dari para beliauah saya memperoleh tambahan ilmu dan metodologi riset serta pemahaman bagaimana berperilaku akademik yang tangguh. Ucapan terima kasih juga disampaikan pada Prof. T.Ihromi dan Prof.Mayling Oey Gardiner yang telah memberi warna pada pemikiran saya tentang studi wanita, pada saat menguji.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada para dosen yang telah saling berbagi ilmu, baik di bidang sosiologi perdesaan, ilmu penyuluhan, ilmu komunikasi pembangunan dan studi wanita. Tercatat nama-nama beliau adalah Prof. Pudjiwati Sayogyo (alm), Prof.Tjondronegoro, Ir.Gunardi MA, Prof. Pang Suparman Asngari, Prof. Ali Rachman, Ir.Bambang Utomo MDS (alm), Ir.Said Rusli MA, Dr. Amri Jahi, Dra. Winati Wigna HDS, Dr. Ekawati Sri Wahyuni, Dr. Sarwititi, Ir. Maksum, MS, dan Ir.Richard Lumintang, MEd. Pada kolega di luar IPB, yang mewarnai pemikiran saya tentang studi wanita dan studi gender, yaitu Prof.Saparinah Sadli, Syamsyiah Achmad, SH, Achie Luhulimah. SH, Dr.Yusuf Supiandi, Aisyah Amini, SH, dan Dr.Yang A. Mutallib disampaikan ucapan terima kasih.

Penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Mantan Menteri UPW Ibu Sulasikin A Murpartomo, dan Mantan Menteri PP Ibu Sri Rejeki Sumaryoto SH, yang selalu mengikutsertakan saya dalam berbagai kegiatan tentang pemberdayaan perempuan dan gender, selama dan setelah mereka menjadi menteri. Kepada Prof. Dr.Tuty Alawi'yah yang berkenan mengikuti acara profesi sebagai sahabat sejawat dan sebidang perhatian diucapkan terima kasih. Kemudian, terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Menteri PP dan PA, Ibu Linda Amalia Sari Gumelar,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar IPB.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

beserta para Deputinya yang telah berkenan hadir dalam Orasi Guru Besar saya hari ini yang merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi IPB, dan saya pribadi. Rupanya, tanpa disadari saya telah berkuat dari menteri ke menteri tentang urusan perempuan dan gender, sehingga mungkin inilah salahsatu alasan mengapa IPB mengukuhkan saya sebagai Guru Besar di Bidang Komunikasi Gender.

Kepada kolega di FEMA, Dr. Djuara P.Lubis, Dr.Titi Sumartiti, Dr.Amiruddin Saleh, Dr.Herien Puspitawati, Dr.Siti Amanah dan Prof. Sjafri Mangkuprawira yang aktif menelaah dan berkontribusi pemikiran pada naskah awal makalah orasi, dan juga pada Prof. Didin S. Damanhuri dan Prof. Bunasor Samim selaku reviewer naskah akhir orasi ini diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada mahasiswa dan asisten saya Rima Rosita, Nuning Kusumowardani, dan Retno Mulyandari yang telah membantu mengumpulkan data dan pada Panji Wasmana, Skom, MS dan Desina Kartika, SSI, MCompSc yang membantu pengolahan data-data tersebut.

Terima kasih disampaikan pada Dr. Amiruddin Saleh, Prof.Dedi Fardiaz, Dr.Basita Ginting, Prof.Musa Hubeis, Dr.Hamdani, Dr.Lala M.Kolopaking, Prof.Sumardjo, Prof. Sjafri Mangkuprawira, Ir.Siti Sugiah MS, Ir.Sutisna Riyanto MS, Ir.Hadiyanto MS, Ir.Melani Sunito MSc, Ir.Maksum MS, Dra.Farida MS, Dra.Krisnarini Matindas MS, dan Ir. Mintarti MS, Dr.Makmun Sarma, sebagai kolega yang telah membantu selama saya menjadi Ketua Prodi KMP (Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Perdesaan) Pascasarjana IPB. Berikutnya, terima kasih untuk Prof.Sjafri Mangkuprawira, Ketua LPPM IPB (1987-1996) dan Prof. Rizal Syarief (periode 1996-2005) yang mempercayai saya menjadi kepala Pusdiklatmas (1988-2003) di LPPM IPB. Kepada sekretaris Pusdiklatmas, Ir.Ida Yohana MS (alm), dan Dr.Illah Sailah yang baru membahu melakukan berbagai kegiatan diucapkan terima

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

kasih. Pada Ir.Teuku Lia Muriza, MSc yang mengumpulkan dan mengolah data untuk berbagai *event* seminar, selama di LPM-IPB, diucapkan terima kasih.

Kepada mereka, yang tidak langsung membantu kelancaran pencapaian karir saya, adalah asisten di rumah yang setia menjalankan tugas domestik, yakni Tinah (20 tahun), Ifa (5 tahun), Annisa (6 tahun), Ismail (9 tahun) dan Wili (5 tahun) sebagai supir, diucapkan rasa terima kasih.

Pada momen berbahagia ini, rasa hormat dan terima kasih tak terhingga disampaikan kepada Abah Ali Hubeis (alm) dan Ibu Fadlun Badjebeir (alm) yang telah mendidik dan membesarkan saya dan sayangnya tidak sempat melihat anaknya menapaki karir sebagai Doktor dan Guru Besar. Begitu pula rasa hormat dan terima kasih untuk mertua, Tb.Mas Mangkuprawira (alm) dan Ibu Soedah (alm) yang turut mendorong saya berprestasi. Semoga arwah Beliau semuanya mendapat tempat yang terbaik di sisiNya

Kepada saudara Hubeis sekandung, Nikmah (alm), Dra. Nurlaela, Salim dan Lukman (alm), Zaenab, Abdul Kadir (alm), Drs. Ibrahim, Azzam, Ismail, Ishak (alm), Yakub, Prof. Musa, Mariam Haniya, Yaniah, dan Isa, terima kasih atas kekeluargaan yang saling peduli. Kepada ipar dari keluarga Mangkuprawira, Tb.Happy, Tb.Eddi, Tb.Sudrajat (alm) dan Tati Ulfa, terima kasih atas persaudaraan yang saling peduli.

Secara khusus, terima kasih untuk keluarga anaku, Drg. Ratu Mirah Afifah, GCC Lindent, MDSsc, Ir.Tb.Nur Ahmad Maulana MBA.MSc.PhD dan Ir.Desina Kartika MCompSc atas doa dan pengertian selama mamah berkarir. Untuk cucuku Putri Farhah Thalli'ah, Khairunnisa Salsabilla, Rizqi Shidqi Prawira, Thariq Ali Tubagus, Tubagus Faris Rahman Maulana, Bianda Azzahra dan Ahmad Farrell Wasmana yang selalu menimbulkan suasana ceria dan hangat disampaikan salam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak mengalkan kepentingan yang wajar. IPB.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



sayang dan cinta. Kepada Prof.Tb.Sjafri Mangkuprawira, suami yang selalu memotivasi saya terus berkarir, berbagi pekerjaan dan tugas rumahtangga, patut diacungi jempol dan ditiru sebagai bukti bahwa kesetaraan gender memang harus dimulai dari keluarga, terima kasih dan terima kasih atas segala kebersamaan selama ini.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak mengiklankan kepentingan yang wajar IPB.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

## Foto Keluarga



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Depan duduk dari kanan: Prof.Dr.Ir.Aida Vitayala S.Hubeis,  
Prof.Dr.Ir.Tb.Sjafri Mangkuprawira.

Belakang berdiri dari kanan: Drg.Ratu Mirah Afifah, GCC  
Lindent, MDSc; Ir.Tb.Nur Ahmad Maulana, MBA.MSc.PhD;  
dan Desina Kartika, SSI, MCompSc



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

## Riwayat Hidup

**Nama** : Prof. Dr. Ir. Aida Vitayala S.Hubeis  
**Tempat, tgl lahir** : Jakarta, 28 September 1947  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Status** : Menikah dengan:  
Prof. Dr. Ir. Tb. Sjafrin Mangkuprawira  
Memiliki tiga orang anak:  
1 Drg.Ratu Mirah Afifah, GCC  
Lindent, MDSc;  
2 Ir.Tb.Nur Ahmad Maulana, MBA.  
MSc.PhD;  
3 Desina Kartika. SSI, McompSc  
**Orangtua** : Abah Ali bin Salim Hubeis (alm)  
Ibu Fadlun Badjebeir (alm)  
**Alamat Rumah** : Jl. Mayjen Ishak Djuarsa –  
Gunung Batu 81/118  
Bogor 16118  
**Telepon/Fax** : 0251 8385488; 0251 8385489  
**HP** : 0811 111 828  
**Email** : [aidavitayala@yahoo.com](mailto:aidavitayala@yahoo.com)  
**Alamat Kantor** : Departemen Sains Komunikasi dan  
Pengembangan Masyarakat – Fakultas  
Ekologi Manusia – IPB  
Kampus IPB Darmaga

## Riwayat Pendidikan Formal

1. Doktor: Komunikasi dan Penyuluhan Pembangunan; IPB kolaborasi dengan Sussex University, Brighton, England, UK, September 1985.
2. Independent Doctorate-Student/PhD Candidate: Studi Literatur (WID & GAD), Sussex University of England, Brighton-UK; 1984-1985.
3. Pre-Doctorate Degree on WID: Anthropological Studies; at School of African and Asian Studies (AFRAS), Sussex University, Brighton, England-UK 1977-1978.
4. Diploma: Keterampilan Mengajar dan Belajar: Program Pembelajaran Jarak Jauh: POD. Depdikbud, 1981/1982.
5. Ir: Sosiologi Pedesaan dan Penyuluhan Pertanian. Fakultas Pertanian IPB, September 1974.

## Riwayat Pendidikan *Non-Degree* (Certificate)

1. Conflict Resolution and Rural Mediation: Arizona State University USA; July 2000; Certificate.
2. Poverty Alleviation: JAICA in cooperation with The Grameen Bank, Bangladesh, 1999; Certificate.
3. Inter-country Networking on Agricultural Extension and Communication Development; UPLB - Los Banjos, SEARCA - CNEARC, November 1997; Certificate.
4. The International Link on Gender and Development. SEARCA, Philippine, 1995; Certificate.
5. Development Strategy on Communication. Manila 1994; Certificate.
6. Editing and Writing Style on Media Design. Graduate School IPB and Wisconsin University USA, 1987; Certificate.



## Riwayat Pekerjaan/Dosen

1. Sejak 2009: Dosen di Program DMB (Doktor Manajemen Bisnis), Program Studi (Prodi) Penyuluhan Pembangunan (PPN), Pascasarjana IPB.
2. Sejak 2007; Dosen di Departemen Manajemen-Fakultas Ekonomi & Manajemen (FEM), Pascasarjana IPB.
3. 2007-2009; Dosen di Prodi Lingkungan (PSL), Pascasarjana IPB.
4. Sejak 2005 sampai sekarang: Dosen tetap di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (KPM), FEMA IPB.
5. Sejak 2004; Dosen di Program MPI (Magister Profesional Industri); di MMB (Magister Manajemen Bisnis), Pascasarjana IPB.
6. Sejak 1985: Dosen di Prodi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (KMP), Pascasarjana IPB.
7. 1975-2005: Dosen tetap di Departemen Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian (Sosek), Fakultas Pertanian IPB.
8. Mengajar di PT lain: UI, Univ. Sahid, UIEU; Penguji mahasiswa Doktor/Master (UI, UGM, Univ. Sahid).

## Mataajaran yang Diampu

1. Jenjang S1: Komunikasi Kelompok; Dasar-dasar Komunikasi; Gender dan Pembangunan.
2. Jenjang S2: Komunikasi Bisnis Lanjut; Perencanaan dan Evaluasi Media Komunikasi; Komunikasi Penyuluhan; Manajemen Sumberdaya Manusia; Pengembangan Sumberdaya Manusia.
3. Jenjang S2 & S3: Komunikasi Gender; Teori-Teori Komunikasi Pembangunan; Landasan Penyuluhan



Pembangunan, Manajemen Pengembangan Sumberdaya Manusia.

4. MMB : Manajemen Sumberdaya Manusia; Etika Bisnis.
5. Jenjang S3: Pengantar Falsafah Sains; Falsafah Sains, Etika Bisnis dan *Corporate Governance*; Manajemen Pemberdayaan Masyarakat.
6. MPI IPB: Komunikasi Bisnis Lanjut.

### **Administrasi Struktural**

1. Sejak 2010: Ketua Komisi C, penilai angka kredit pengusulan Guru Besar, Senat Guru Besar FEMA IPB.
2. Sejak 2008: Anggota Senat Dewan Guru Besar (DGB) FEMA IPB; Anggota Senat DGB IPB.
3. Sejak 2008: Anggota TPAK (Tim Penilai Angka Kredit), tingkat IPB.
4. 2001-2003: Kepala Pusat (Kapus) IRADRU (Indonesian Rural Mediation and Alternative Dispute Resolution Unit); Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPM) IPB.
5. 1999-2001: Ketua Program Eksekutif dari Prodi KMP; 1995-2003: Ketua Prodi KMP, Pascasarjana IPB.
6. 1996-2000: Ketua Lab. Penyuluhan Pertanian dan Komunikasi (PKP), Jurusan Sosek, Faperta IPB.
7. 1990-1996: Sekertaris Eksekutif Senat Faperta, IPB.
8. 1988-2003: Kapus Pendidikan dan Pelatihan Pada Masyarakat (Kapus Diklatmas), LPM IPB.
9. 1986-1988: Ketua Komisi Pendidikan pada Jurusan Sosek Pertanian, Fakultas Pertanian (Faperta), IPB.

## Pengalaman Kerja/Pengabdian Tingkat Nasional

1. 2004-2007: Ketua Tim Penilai Independen Pemberian APE (Anugerah Parahita Eka Praya); Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. 1999-2000: Koordinator Nasional (Kornas) P4M2T (Program Peningkatan Penyuluhan Pertanian Menuju Ketahanan Pangan Nasional); Kerjasama LPM IPB, Deptan, Depkop & KUKM, Bappenas.
3. 1998-1999: Kornas Proksidatani (Program Aksi Pemberdayaan Masyarakat Tani); Kerjasama LPM IPB, Deptan, Depkop&KUKM, Bappenas.
4. 1994-1998: Kornas Program Rekrutmen dan Pelatihan PKL (Petugas Konsultasi Lapangan); Kerjasama LPM IPB dengan Depkop& KUKM.
5. 1997-1999: Anggota Tim Ahli Program Gerakan Sayang Ibu (GSI); 1996-1999: Wakil Ketua dan Anggota Tim Ahli Pokja P2WKSS; Kantor Menteri UPW.
6. 1988-2001; Anggota Pokja Nasional SP3; Ditjen Diklusepora-Depdikbud dan Kantor Menpora.
7. 1992-1998: Ketua Tim Intervensi Pemberdayaan PMJ di 10 Provinsi.

## Pelatihan (Sebagai Koordinator/Pelatih: skala nasional)

1. Tahun 2001-2003: Communication, mediation and Conflict Resolution Training. LPM IPB in Cooperation with Arizona University USA; Bogor, May.
2. Tahun 1998-2002: Pelatihan untuk Pedagang Makanan Jajanan; kerjasama dengan Pemda Cianjur dan Sukabumi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

3. Tahun 1999: Pelatihan untuk 5.000 orang Tenaga Pendamping P4M2T dari 13 provinsi, kerjasama LPM IPB dengan Deptan dan Depkop-UKM.
4. Tahun 1998: Pelatihan untuk 215 orang pelatih (TOT) Proksidatani dan 5000 sarjana Pendamping Proksidatani: Kerjasama Pusdiklat LPM IPB dengan Deptan dan Depkop-UKM.
5. Tahun 1997-1998: Pelatihan untuk 800 orang Motivator Pembangunan Desa, dari 27 provinsi; kerjasama Pusdiklat LPM IPB dengan Direktorat pemuda dan Olahraga, Diklusespora, Depdikbud.
6. Tahun 1995-1998: Pelatihan untuk 1.500 orang Petugas Konsultasi Lapangan (PKL) Depkop dan UKM; direkrut dari 27 provinsi..
7. Tahun 1995-1996: Pelatihan untuk Pelatih (TOT) untuk Fasilitator PMJ dari 10 provinsi (UI/Pemda DKI Jaya, Unpad/Pemda Jabar (Bogor, Sukabumi, Cianjur), Unisula/ Pemda Jateng, UGM/Pemda DIY, Unair/Pemda Jatim, Unila/Pemda Lampung, Unsri/Pemda Sumsel, Unram/ Pemda NTB, Unhas/Pemda Sulsel).
8. Tahun 1995-1996: Penyuluhan untuk Pedagang Makanan Jajanan: Bogor (Kotamadia dan Kabupaten Bogor; kabupaten Cianjur, kabupaten Sukabumi)
9. Tahun 1995-1996: In house training Four Short Courses of Academic Management, Laboratory Technician, Teaching Improvement, and Research Management; Enam PT (Unpad, Unair, Undip, Unlam, Untan, dan IPB).
10. Tahun 1994-1996: Pelatihan Koordinator PKL Depkop UKM; Pusdiklat Koperasi dan UKMME, Jakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



11. Tahun 1992-1993: Research Management Enhancement Course. Kerjasama dengan IDRC Philippine dan Institute for Management Los Banos.

## Penelitian dan Konsultasi (5 Tahun Terakhir)

1. Mei-November 2010: Ketua Tim Studi “Pemberdayaan Perempuan menuju Kesetaraan Gender: Hibah Kompetensi (Hikom) - Kemendiknas.
2. November 2009-Januari 2010: Ketua Tim “Studi Tindaklanjut Spot Checks Program Keluarga Harapan (PKH) tahun program 2007-2009 di 13 provinsi Indonesia”. PT Cakra Buana-DepsosRI.
3. Oktober 2008–Juli 2009. Senior Researcher: Study on Islamic Organization and Women Empowerment in Indonesia”. International Centre for Applied Finance and Economics(Intercafe) LPPM IPB in association with University of Adelaide:
4. November 2008-Januari 2009: Ketua Tim “Studi Base Line PKH tahun program 2008 di 6 provinsi Indonesia”. PT Cakra Buana-DepsosRI.
5. November 2008-Januari 2009: Ketua Tim “Studi “Spot Checks PKH tahun program 2007 di 7 provinsi Indonesia”. PT Cakra Buana-DepsosRI.
6. November 2008; Single senior Consultant “Desk Studi Proyeksi Penduduk Indonesia 2005–2025, Implikasinya Untuk Pembangunan Responsif Gender”. Programme Component Population and Development Strategies BPS-Statistics Indonesia Proyek UNFPA siklus ketujuh.
7. Tahun 2008: Peneliti Senior dalam “Studi Evaluasi Pengarusutamaan Gender di KNRT” dan Penyusun

“Pedoman Umum PUG di KNRT (Kementerian Negara Riset dan Teknologi)”.

8. Tahun 2007: Peneliti Senior “Studi Evaluasi PUG dalam bidang Kehutanan: Kasus Kabupaten Bogor” KNPP RI.
9. Tahun 2007: Single Senior Consultant for “Study on Gender Indicator”. UNDP-KPP RI.
10. Tahun 2006: Peneliti Senior “Studi Pengarusutamaan Gender di Departemen Pendidikan”. KNPP RI.
11. Tahun 2006: Peneliti Senior “Studi Evaluasi Pengarusutamaan Gender di tingkat Daerah”. KNPP RI.
12. Tahun 2006: Ketua Tim “Studi tentang Gender Kategori. KNPP RI.
13. Tahun 2006: Ketua Tim “Studi tentang Profil Direktorat Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial”. Depsos RI.
14. Tahun 2006: Single Senior Consultant for Capacity Building on Gender Mainstreaming. ERTR-UNDP Aceh.
15. Tahun 2006: Peneliti Senior “Studi Evaluasi PUG di Departemen KUKM”. Bappenas dan KNPP RI.
16. Tahun 2006: Peneliti Senior “Studi Evaluasi terhadap Implementasi Inpres No.9 Tahun 2000 di 10 Provinsi Indonesia”. KNPP RI.
17. 2004-2006: Fasilitator Nasional tentang PUG Sektor KUKM; KNPP RI dan Bappenas.
18. Tahun 2005: Ketua Tim “Studi tentang Wanita, Teknologi Komputasi dari Perspektif Analisis Gender”. KNPP RI.
19. Tahun 2005: Anggota Tim “Studi Evaluasi KUBE; DepSos RI.



20. Tahun 2004: Ketua Tim Studi “Pedagang Kaki Lima di Empat Provinsi di Indonesia; Dep. Pariwisata RI.
21. Tahun 2004/2005: Consultant: “Study on Integrating gender in Papua Assesment to Alleviate Poverty; UNDP: Gender specialist.&Basic Social services.

## **Keanggotaan Professional dan LSM**

1. Sejak 2010: Termasuk salahsatu Pendiri dan Anggota dan “TimTujuh Pemberdayaan Perempuan”. The Habibic Centre. Ketua Tim, Ibu Sulasikin Murpratomo;
2. Sejak 2009: Pendiri dan Ketua Dewan Direktur PKGI (Pusat Kajian Gender Indonesia).
3. Sejak 2007: Pendiri dan Direktur IPPI (Institut Pendidikan Perempuan Indonesia).
4. Sejak 2003: Pendiri dan Anggota Presidium FCMP (Forum Cendekiawan Muslimah Peduli). Diketuai oleh Prof.Dr.Ir. Zuraeni Jamal.
5. 2003-2007: Pengurus IMWU (International Muslem Women Union). Diketuai oleh Prof.Dr.Tutty Alawiyah
6. 2003-2010: Anggota Majelis Pakar MAAL. Diketuai oleh Prof.Nabilah Lubis; Dr.Iried Agus.
7. Sejak 2005: Pendiri dan Anggota Presidium Mitragender Nasional Indonesia. Diketuai oleh Ibu Sri Rejeki Sumaryoto.
8. Sejak 2001: Tim Ketua YPPB (Yayasan Perempuan Peduli Bangsa). Diketuai oleh Kartini Fahmi Idris.
9. Sejak 2001: Pendiri dan Ketua Umum Himpro FORKAPI (Forum Komunikasi Pembangunan Indonesia)
10. Sejak 2005: Wakil Ketua Dewan Pakar ICMI Pusat (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak mengiklankan kepentingan yang wajar IPB.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



11. Sejak 1999: Pendiri dan Ketua Yayasan Proksidatani
12. 1997-2003: Pengurus YABI (Yayasan Amal Bakti Ibu). Diketahui oleh Ibu Sulasikin Murpratomo.
13. Sejak 1996: Pendiri dan Pembina Komakjan (Koperasi Makanan Jajanan Indonesia).
14. Sejak 1996: Pembina APKMJI (Asosiasi Pedagang Kecil Makanan Jajanan Indonesia).
15. 1996-2000: Tim Ketua ICMI Pusat (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). .
16. 1994-1996: Tenaga Ahli untuk KOWANI (Kongres Wanita Indonesia).
17. 1990-2001: Pendiri dan Sekjen PAPPI (Perhimpunan Ahli Penyuluhan Pembangunan Indonesia).

### **Publikasi (buku/jurnal ilmiah/manual/monografi)**

1. Mangkuprawira, Sjafri dan Hubeis, Aida VS 2007. Manajemen Mutu Sumberdaya Manusia; Galia Press.
2. Gender Analysis Pathway in Policy Outlook and Action Planning; Co-operative and SME Sectors. Dokumentasi Bappenas. 2006.
3. Hubeis, Aida VS 2001. Gender, Poverty and Employment Opportunities for Women. 8 Modules. EOW Project, ILO.
4. Peran Penyuluhan Pembangunan di Indonesia Menyongsong Tahun 2000. PT Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara. Edisi ke-enam, dipublikasi pertamakali tahun 1992.
5. Perangkap Gender dalam Pembangunan. Dipublikasi dalam Buku. Peran Penyuluhan Pembangunan di Indonesia Menyongsong Tahun 2000. Pengarang Aida Vitayala. *et. al.*, edisi ke-enam 1997.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak mengaitkan kepentingan yang wajar. IPB.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



6. Perempuan dan Antisipasi Krisis Ekonomi. Jurnal KITA, Juni 1998. .
7. Women in Indonesia Today: Cultural Roots and Recent Development. Published by Republic Federation of Germany, 1998.
8. Pembangunan Norma-norma Perempuan Menuju Kesejahteraan Keluarga dalam Era Global. Dalam buku Achmad Tirtosudiro. Dipublikasi tahun 1997.
9. Development Planning Based On Gender. Modules prepared for Provincial Officers of Ministry of Internal Affairs (MI). UNDP and MI-GOI, 1997.
10. Makanan Bersih, Sehat, dan Halal. Gender Dimension and Democratisation. In "Fighting The Future," Published by PT Amanah Putra Nusantara, first edition. Jakarta, 1997. Published in UMMAT Magazine. Edition. LII/ March/1997.
11. The Socio Economic Role of Women in the Sulawesi Regional Development Project: Sanrego and Gulamas. Published by SRDP: ISBN 0-88955-310-6, ISSN II 92-1439, and #1. March 1991. Didokumentasikan di Library Guelph University-Toronto-Canada.
12. The Role of Local Government in Street food Development in Indonesia. Published in Bulog Magazine. 1995
13. Studi Wanita dari Perspektif Feminis. Dalam Proseding Konsultansi Studi Wanita di Indonesia. September 1990. Dipublikasi oleh LPM UKSW (Universitas Kristen Satya Wacana), Salatiga. Mei, 1991.
14. Feminisme. Disampaikan pada Seminar Nasional tentang "Studi Wanita di In Indonesia. Dipublikasi dalam berbagai buku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.





15. The Prospect of Indonesian Traditional Food Development: Case of Traditional Food. Published 1995.
16. Menggerakkan Masyarakat Lewat penyuluhah. 1993. Depdikbud, Ditjen Diklusepora, Proyek Rintisan SP3., Februari 1993.
17. Pendekatan Masyarakat. 1993. (ditulis bersama Sjafrri Mangkuprawira). Depdikbud, Ditjen Diklusepora, dan Proyek Rintisan SP3. Februari 1993..
18. Tehnik Wawancara. 1993. (ditulis bersama Sjafrri Mangkuprawira). Dipublikasi oleh Depdikbud, Ditjen Diklusepora, dan Proyek Rintisan SP3. Februari 1993.

### **Makalah Seminar/Pelatihan/Modul (5 tahun terakhir) Tahun 2010**

1. Keadilan dan Kesetaran Gender dalam Perspektif Peradaban Masyarakat Madani. Makalah dalam Sarasehan Nasional **Membangun Peradaban Indonesia Modern**; diselenggarakan oleh ICMI, bertempat di PT. Ilthabi Lt. 1, Taman A9, Jl.Mega Kuningan Lot 8,9/9 Kuningan Jaksel; 31 Juli 2010.
2. Become Facilitator: Module prepared for Workshop TOT Port Aothorities: A joint cooperation between PKSPL IPB and Bremenport, Inwent and Departement of Transportation RI; Hotel Pangrango 5-13 July 2010
3. *Road Map* Gender dan Lingkungan: Makalah untuk Revitalisasi PSW dan PSL Direktorat Akademik, Ditjen Dikti, Kemendiknas; Jakarta, 22 Mei 2010.
4. Anggaran Responsif Gender: Makalah dalam acara Diklat Nasional PUG Dalam Pembangunan dan Bintek ARG (Anggaran Responsif Gender): Mitragender Nasional & Pusat Kajian Parlemen Indonesia Angkatan I: Htl Goodway Batam, 18–20 Mei 2010.



5. Strategi Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Minapolitan: Prof.Dr.Ir.Aida Vitayala S. Hubeis dan Ir.Panji Wasmana,Msi: Makalah Seminar Nasional Membangun Minapolitan Berbasis Masyarakat; FEMA IPB bekerjasama dengan DKP PPK, DKP-RI dan PKSPL IPB: Bogor. 25 Maret 2010.
6. Agenda Strategis Pemenuhan Hak TKI Perempuan: Penyunting; The Habibie Centre Maret 2010.
7. REVIEW: Studi Pengembangan Protokol Penyelamatan dan Penanggulangan Krisis Pangan dan Gizi pada Kelompok Rawan; Seafast Centre; 8 Februari 2010)
8. Konsep Dasar Gender dalam Pembangunan. Makalah dalam Acara Diklat Nasional PUG dalam Pembangunan dan Bintek ARG; Diselenggarakan oleh Pusat Kajian Parlemen Indonesia & Mitragender; Bertempat di Hotel Grand Cempaka, Jakarta. Tanggal 4-6 Februari 2010
9. Kebijakan, Program, Kegiatan dan Perspektif Gender di Bidang KUMKM: Makalah pembahas dalam Workshop Identifikasi Isu Tematik dan Penyusunan Kerangka Kerja Pokja PUG tentang Ekonomi Makro; KemenegPP&PA RI, 11 Januari 2010, di Hotel Grand Kemang Jakarta.

## Tahun 2009

1. Pencapaian Quota 30% Pemimpin Nasional Serta Posisi Perempuan Dalam Segala Bidang Sebagai Perwujudan Kesetaraan Gender. Makalah dalam acara Silat urrahmi Nasional Cendekiawan Perempuan Indonesia: Htl Sahid Jaya, 20-21 Februari 2009, Jakarta.
1. Peran Keluarga dalam Pemanfaatan Tanaman Obat Tradisional dalam Era Krisis Global; Institut Pendidikan Perempuan Indonesia (IPPI) bekerjasama dengan



Kedepuyan SDM--Kemeneg KUKM; Gedung Yayasan Bina Insan Cita, Sugutama, Depok, Maret 2009.

12. Elektabilitas Caleg Perempuan pada Pemilu 2009; makalah dalam Workshop dan Sosialisasi Nasional Program Mobile Voter Education Campaign; Cohati PB dan UNDP; 11 Maret 2009, Hotel Naharaja Mampang Prapatan, Jakarta
13. Sejarah dan Pengantar Studi Wanita. Makalah dalam Pelatihan Metodologi Studi Gender. LPPM –PSP- Divisi Kajian Wanita, Gender dan Pembangunan. PSP3 LPPM IPB Kampus Baranangsiang, Bogor, 23 April 2009.
14. The Gender Responsive Analysis of Partnership Development of Medium, Small and Micro Businesses in Indonesia; Paper presented at The 9<sup>th</sup> Conference of Asia-Pacific Sociological Association (APSA); June 13-15, 2009 Kuta Bali Indonesia (ditulis bersama Titi S.)
15. Analisis Teori Performance dan Positioning dalam Komunikasi Pembangunan Berwawasan Gender (ditulis bersama Retno, SHM); dalam Prosiding Seminar Nasional “komunikasi Pembangunan Mendukung Peningkatan Kualitas SDM dalam Kerangka Pengembangan Masyarakat; diselenggarakan oleh FORKAPI di IPB Convention Centre, 19 November 2009.
16. Perilaku Masyarakat dalam Pemanfaatan Information Communication Technology dalam Mendukung Pengembangan Masyarakat Global. dalam Prosiding Seminar Nasional “komunikasi Pembangunan Mendukung Peningkatan Kualitas SDM dalam Kerangka Pengembangan Masyarakat; diselenggarakan oleh FORKAPI di IPB Convention Centre, 19 November 2009.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

## Tahun 2008

17. Kiat Membangun Tim Kerja Humas yang Profesional. Makalah dalam acara Forum Koordinasi dan Workshop Pejabat Humas II se-Provinsi Riau - Pekanbaru; Pemerintah Provinsi Riau Setda, Hotel Mutiara Merdeka Jl. Yos Sudarso Pekanbaru Riau; 21-23 November 2008
18. Merancang Program Pendampingan Perempuan Politisi. Makalah dalam Pelatihan Kader Politik Perempuan Se-Provinsi Sumbar; acara Pengukuhan Mitragender Wilayah Sumbar; Htl Bumi Minang. 24-25 Oktober 2008.
19. Konsep Gender Dalam Pembangunan. Makalah dalam Acara “Workshop PUG bagi Para Widyaiswara dan Pejabat Diklat Depdagri”. Diselenggarakan oleh: KemengPP&PA; Hotel Resort Prima Cipayung. Bogor, 22 Agustus 2008.
20. Konsep-Konsep Terkait Gender. Makalah dalam acara “Capacity Building PUG Bagi Perencana Program SKPD dan Focal Point Gender di Lingkungan Pemprov Kaltim; 28 Agustus 2008.
21. Homo Sexual Dan HAM: Suatu Tinjauan Teoritis Dan Empiris. Makalah dalam Forum Kajian Tokoh Muslimah (Forum KITA) ke-2 – Hizbut Tahrir Indonesia; Gedung Intiland Tower (Wisma Dharmala Sakti) – Ruang Nilakandi Jl. Jenderal Sudirman Kav32 Jakpus, 22 Juli 2008.
22. Pentingnya Pendidikan Bagi Perempuan: Menuju Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG). Makalah dalam: Acara Temu Nasional Prestasi Perempuan Indonesia; MitraGender, Hotel Redtop Lt 3 Jakarta, 24-26 Juli 2008.
23. Kesetaraan Gender Dan Peran Perempuan. Makalah dalam acara Seminar Nasional Jati Diri Bangsa, Kesetaraan Gender dan Peran Perempuan. Diselenggarakan oleh Forum Aksi Jati Diri Nusantara (Fajar Nusantara); Gedung DHN 45 Jl. Menteng Raya, Jakpus, 3 April 2008.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar IPB.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



24. Komunikasi Politik Perempuan. Makalah dalam Seminar Nasional Demokratisasi dan Peran Politik Perempuan Indonesia, Pemda Sumatera Selatan, 26 April 2008.
25. Peran Perempuan dalam Politik. Makalah dalam acara Dialog Nasional Antar-generasi Perempuan; Diselenggarakan oleh MitraGender & KemenegPP&PA, 18 April 2008; di Hotel Redtop Lt 3 Jakarta.
26. Kesetaraan Gender dan Politik. Makalah dalam Workshop Strategi dan Komunikasi Politik Perempuan Jelang Pemilu 2009: ADEKSI, Hotel Santika Jakarta, Jl. Aipda K.S Tubun Jakarta; 28 April – 1 Mei 2008.
27. Pemahaman Gender Dan Kaitannya Dengan PUG. Makalah dalam acara Semiloka Nasional Kesetaraan Gender dan Implementasi PUG; KemenegPP&PA; Hotel Permata, Bogor, 24 Maret 2008.
28. Menghapus Kemiskinan. Pemikiran sebagai bahan Diskusi dalam Rapat terbatas Dewan Penasehat Kosgoro dalam menyongsong Mubes II Kosgoro 1957. Gedung Granadi Lt 4, Jl H.R. Rasuna Said Kav 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan; Februari 2008.

### Tahun 2007

29. Akses Perempuan Terhadap Sumber Permodalan: Makalah di Acara Silaturahmi dan Semiloka Nasional Perempuan Perlemen Se-Indonesia. Jakarta 22-24 November 2006 Gedung Nusantara IV DPR RI dan Hotel Sahid Jaya Jakarta.
30. Gender dan Perjuangan Politik Kaum Perempuan. Makalah dalam Pelatihan dan Pendidikan Politik Kader Perempuan Se-Propinsi NTB & Penguatan Mitra Gender Wilayah NTB-Mataram 15-16 Desember 2007.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan yang wajar IPB.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

31. Kepemimpinan Perempuan dalam Politik. Makalah dalam acara Diklat Politik Kader Perempuan Se-Provinsi NTB; MitraGender, 15-16 Desember 2007. Hotel Lombok Raya, Mataram, Provinsi NTB.
32. Gender dan Gerakan Organisasi Perempuan. Makalah dalam Lokakarya Kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan. Kabupaten Karimun Kepulauan Riau, Kantor Pemda Kab. Karimun, 26-27 Desember 2007.
33. Evaluasi Implementasi Pengarusutamaan Gender di Bidang Kehutanan. Makalah dalam acara Seminar Nasional Pembangunan Kehutanan dalam Perspektif Gender. Dephut RI, Hotel Peninsula Jakarta, 2-12- 2007
34. Pengembangan Kehumasan Pemerintahan. Makalah dalam acara "Sosialisasi Jabatan Fungsional Pranata Humas" se-Provinsi Riau – Pekanbaru. Pemprov Riau Setda, Hotel Mutiara Merdeka, Pekanbaru, Riau; 21-23 November 2007.
35. Penguatan Kelembagaan Masyarakat Tertinggal dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan. Makalah dalam acara Workshop Penguatan Kapasitas dan Peran Kelembagaan Pemerintah dan Kelembagaan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; Kementerian Negara PDT, Hotel Mercure Jakarta, 23-24 November 2007.
36. CEDAW dan MDGs dalam Memperjuangkan Perempuan. Makalah dalam Lokakarya Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan. Kabupaten Bogor. Pemda Kab. Bogor, 19 November 2007.
37. Paradigma Baru Peran Perempuan dalam Berorganisasi. Makalah dalam Lokakarya Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan. Kabupaten Bogor. Pemda Kab. Bogor, 19 November 2007.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak mengalkan kepentingan yang wajar. IPB.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



38. Peran Perempuan untuk Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dalam Pembangunan Nasional. Makalah dalam acara "Round Table Discussion", Lemhanas 12.10.2007.
39. Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Realita Kehidupan Masyarakat. Makalah dalam acara Rapat Kerja Sinkronisasi Program Pemberdayaan Perempuan; Kepulauan Riau (Kepri); 5-7 September 2007.
40. Peran Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Nasional. Makalah dalam acara "Perempuan, Politik dan Pertanian". RRI Bogor, Studi Gender dan Pembangunan PSP3 LPPM IPB dan Humas IPB; Bogor 1 September 2007.
41. Public Relation sebagai Perangkat Manajemen dalam Organisasi. Panel Diskusi PR Efektif dalam Organisasi Profesional. Diselenggarakan oleh Pengurus Besar IIDI (PB IDI)-Ruang Serbaguna RS Pondok Indah Lt 6 Jakarta Selatan; 1 September 2007.
42. Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dalam Realita Kehidupan Masyarakat. Makalah dalam acara Semiloka Nasional Kesetaraan Gender dan Implementasi Kekinian Dilihat dari Nilai-nilai Dasar Islam; diselenggarakan oleh Yayasan Perempuan Peduli Bangsa (YPPB), 21 Juli 2007, Wisma PKBI, Jakarta.
43. Peran Perempuan dalam Politik: Dilematis?; Peran Perempuan dalam Politik: Kasus Susduk. Acara Dialog Nasional Antar-generasi Perempuan; Diselenggarakan oleh MitraGender & KNPP RI, Htl Redtop Lt 3 Jakarta; 24-26 Juli 2007.
44. Analisis Gender; Teori dan Konsep Gender; Makalah dalam acara Pelatihan Kesetaraan Gender di Kabupaten Natuna; Hotel Natuna Jl. Subrantas Ranai, Natuna, 23 Juli 2007.



45. Peangarusutamaan Gender pada Organisasi Profesi & Swasta dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak. Makalah dalam Forum Pertemuan Nasional Lembaga Masyarakat Bagi Organisasi Profesi dan Swasta, Hotel Bumi Wiyata, Jl. Margonda Depok 11-13 Juni 2007; Diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KNPP) RI.

46. Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Perdesaan. Makalah Acara Seminar dan Lokakarya "MENUJU DESA 2030"; PKSPL, PSP3, P4W, LPPM IPB. 9-10 Mei 2007, Gedung MM-IPB, Bogor.

47. Anggaran Responsif Gender. Makalah dalam Acara Workshop Nasional Perencanaan Pembangunan Daerah Berwawasan Gender Masyarakat Peduli Kesetaraan dan Keadilan Gender (Mitra Gender).

### Tahun 2006

48. Pendidikan Karakter dan Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan. KPP RI, Juni 2006.

49. Peran Perempuan dalam Pertanian Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender. KPP RI, Oktober, 2006.

50. Anggaran Responsif Gender. Makalah dalam Acara Workshop Nasional Perencanaan Pembangunan Daerah Berwawasan Gender; Mitragender; September 2006..

51. Pemantauan dan Penilaian Kebijakan dan Program Sensitif Gender. Lokakarya Pengarusutamaan Gender bagi Pejabat Struktural Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta, 21 September 2006

52. Gender Awards. Disampaikan dalam Acara Temu Koordinasi Nasional Pengarusutamaan Gender. KNPP RI; Aston Hotel September. KPPRI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar. IPB.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)  
Bogor Agricultural University



53. Pemberdayaan Kelembagaan Lokal Berbasis Perdesaan yang Berperspektif Gender. Makalah dalam Acara Forum Diskusi “Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Sensitif Gender. KNPI RI; 12 September 2006 Kantor Menteri PP, Jl. Abdul Muis No. 7 Lt 9
54. Mainstreaming Gender in Indonesia. Acara Diskusi Dua Bulanan YPPB (Yayasan Perempuan Peduli Bangsa); bertempat di Widya Chandra IV/21 JKT. Juni 2006
55. Studi Evaluasi Inpres No. 9/Tahun 2000. Disampaikan pada Acara Temu Koordinasi Pengembangan Mekanisme Jaringan Kerja antara Lembaga PP Propinsi dan PSW/PSG. Htl Aston Atrium–Jkt – 17/18.01.06. KNPP – RI.
56. Gender dan Perjuangan Organisasi Perempuan Indonesia. Makalah dalam Upgrading Nasional Kepemimpinan Organisasi Perempuan Indonesia. Diselenggarakan oleh Institut Era Indonesia (Inersia) dan Indonesia Women Centre, Hotel RedTop, Pecenongan 72, Jakpus; tanggal 26-28 April 2006.
57. Pornografi dan Hak Perempuan: tinjauan dimensi Kesetaraan dan Keadilan Gender: Makalah dalam Acara Kontroversi Seputar Pornografi; Diselenggarakan oleh Forhati Nasional; Kahmi Centre, Jln Turi I No. 14 Senopati Jaksel; tgl 27 April 2006.
58. Pornografi: Suatu Tinjauan Pengetahuan: Makalah dalam Widyaloka Nasional Pornografi dan Pornoaksi (Menyongsong lahirnya RUC Anti Pornografi dan Pornoaksi); Diselenggarakan oleh Mitragender; Hotel Millenium Sirih, Jakarta. 21-23 Maret 2006.



## Penghargaan yang pernah diterima:

1. Dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, pada Tahun 1999, sebagai pembina Koperasi
2. Dari Menteri Pangan, pada Tahun 1999, sebagai pembina pedagang jajanan/Jasa boga
3. © Dari Menteri Pemberdayaan Perempuan, Tahun 1999, sebagai salah satu dari 1000 Tokoh wanita di Indonesia.
4. Satya Lencana Karya Satya untuk Pengabdian 30 tahun sebagai Dosen dari Presiden.

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengalkan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



1. Dirang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dirang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

**PT Penerbit IPB Press**  
Kampus IPB Taman Kencana  
Jl. Taman Kencana No. 3, Bogor 16151  
Telp. 0251 - 8355 158 E-mail: ipbpress@ipb.ac.id